

## **Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional**

**Cici Fitri Bety<sup>1</sup> T Heru Nurgiansah<sup>2</sup>**

Universitas Darma Agung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1</sup>  
Universitas PGRI Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Indonesia<sup>2</sup>

Email: [cici.fitri1992@gmail.com](mailto:cici.fitri1992@gmail.com)<sup>1</sup> [nurgiansah@upy.ac.id](mailto:nurgiansah@upy.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Pemilihan Umum adalah mekanisme untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan menduduki lembaga perwakilan rakyat dan memilih presiden serta wakil presiden. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia memiliki karakteristik unik yang menarik untuk diteliti, dengan beberapa pemilihan yang telah dilaksanakan sejak era Orde Lama pada tahun 1955, Orde Baru pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, serta pada masa Reformasi yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2019. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan fokus pada bagaimana pelaksanaan pemilihan umum dari awal kemerdekaan hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu pada masa Orde Lama sudah dapat dianggap demokratis, ditandai dengan partisipasi banyak partai politik. Namun, pada masa Orde Baru, kedemokratisan ini menurun seiring dengan dominasi rezim Soeharto. Sementara itu, pemilihan umum pada masa Reformasi, terutama pada tahun 2004, menjadi lebih demokratis. Pemilu 2019 diadakan secara serentak untuk pertama kalinya, meskipun banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Penulis berharap jurnal ini bermanfaat dalam menambah wawasan akademis terkait penyelenggaraan pemilihan umum, serta memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat dan masukan untuk pemilu-pemilu berikutnya.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum, Demokrasi, Partai Politik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Pemilu merupakan alat independensi orang buat memilah anggota DPR, DPD, Kepala negara serta delegasi kepala negara, serta buat memilah badan DPRD yang dicoba dengan cara langsung, biasa, leluasa, rahasia, jujur, serta seimbang dalam Negeri Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Pancasila serta Hukum Dasar Negara Republik Indonesia. Pemilu dalam negara- negara kerakyatan tercantum di Indonesia ialah sesuatu cara yang menaruh independensi orang seluruhnya ditangan orang itu sendiri lewat sistim pergantian kewenangan dengan cara rukun yang dicoba dengan cara teratur cocok dengan prinsip- prinsip dalam penentuan biasa yang cocok dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) diisyarati kalau tiap masyarakat negeri berkuasa turut dan serta aktif dalam tiap cara pengumpulan ketetapan kenegaraan. Berartinya dilaksanakan Penentuan Biasa pada dasarnya merupakan buat melakukan independensi orang; memastikan ataupun setidak- tidaknya memperbaharui perjanjian pihak masyarakat negeri; pengaruhi sikap masyarakat negeri; serta ceria penguasa buat terus menjadi memercayakan perjanjian dari orang dibanding pemaksanaan buat menjaga legitimasinya. Penentuan biasa di Indonesia semenjak 1955 sampai dikala ini yang terakhir hadapi banyak sekali pergantian dari pandangan kerangka hukum, eksekutor, jenjang, partisipan, kelembagaan, Pelanggaran, ataupun manajemen pelaksanaannya. Salah satu dimensi dalam memperhitungkan berhasil nya penajaan penentuan biasa merupakan partisipasi politik yang direalisasikan dengan pemberian hak suara oleh warga yang sudah memiliki hak seleksi. Bisa dibilang kalau terus menjadi besar partisipasi warga dalam pemilahan biasa itu lebih bagus. Memandang kilas balik sejarahnya, negeri Indonesia sudah lewat 11 kali penentuan biasa. ialah

pada era Sistem Lama ialah tahun 1955, era Sistem Terkini tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 serta 1997 dan pada era Pembaruan penentuan biasa dilaksanakan tahun 1999 serta 2004. Bagi informasi dari KPU,“ pemilu awal dilaksanakan pada tahun 1955 pada era kerakyatan parlementer pada dewan menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu pada tahun 1971 serta tahun 1977 pada rezim Sistem Terkini memakai sistem perwakilan berbanding. Terbebas dari asal usul serta sistem penentuan biasa di Indonesia, dalam penerapannya ada permasalahan yang kerap timbul dalam tiap cara pemilu serta setelah itu jadi kontroversi dalam aturan kehidupan berdemokrasi di negeri Indonesia

Indonesia ialah negeri kerakyatan yang sudah menyelenggarakan penentuan biasa dengan cara teratur bersumber pada pada konstitusi. Dari pemilu awal diselenggarakan pada 1955 sesudah kebebasan bangsa Indonesia terkini berumur 10( sepuluh) tahun. Dalam penentuan biasa 1955 itu timbul 4( 4) partai besar ialah Partai Nasional Indonesia( PNI), Nahdlatul Malim( NU), Masyumi serta Partai Komunis Indonesia( PKI). Sistem Pemilu yang dipakai merupakan sistem perwakilan berbanding ataupun sepadan. Tujuan yang akan digapai pada penentuan biasa 1955 merupakan akan menciptakan kemauan orang yang hendak jadi bawah kewenangan penguasa serta pula buat membuat konstituante yang hendak memutuskan sesuatu UUD untuk negeri Indonesia. Pemilu 1955 dilaksanakan pada era Kerakyatan Parlementer, ialah masa dewan menteri Burhanudin Harahap. Pemungutan suara dicoba 2( dua) kali, ialah buat memilah badan DPR pada 29 September 1955 serta buat memilah badan Badan Konstituante pada 15 Desember 1955. Penentuan biasa yang sudah dilaksanakan di Indonesia mempunyai karakter sendiri-sendiri yang amat menarik buat diawasi paling utama penentuan biasa pada era Sistem Terkini serta penentuan biasa 2004. Analogi yang diartikan disini merupakan dasar penentuan biasa, penerapan penentuan biasa, dan akibat untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Dalam riset ini pengarang lebih mementingkan riset pada penentuan biasa awal sekali terbuat. Bertolak dari pandangan diatas periset berarti mengangkut kasus itu dalam riset yang berjudul“ Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia. Pengarang berambisi supaya rasanya penyusunan harian ini berguna buat bisa membagikan masukan sekalian menaikkan ilmu wawasan serta literature dalam bumi akademis, khususnya mengenai keadaan yang berkaitan dengan eksekutor penentuan biasa alhasil bisa membagikan penataran politik untuk warga, serta buat pemilu selanjutnya. Oleh sebab itu, bersumber pada pemaparan permasalahan di atas periset hendak melakukan riset yang berjudul“ Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional”.

#### **METODE PENELITIAN**

Riset hendak dicoba di SMP Swasta Yaspemda Belawan pada anak didik kelas VII T. P. 2023/ 2024. Direncanakan riset ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2023. Hingga populasi dalam riset ini merupakan semua anak didik kelas VIII SMP Swasta Yaspemda yang berjumlah 45 orang serta guru Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan. Berikutnya bila jumlah subyeknya besar didapat 10- 15% ataupun 20- 25% ataupun lebih”. Bersumber pada populasi di atas hingga ilustrasi dalam riset ini merupakan 424 anak didik serta 1 guru PPKn, alhasil riset ini mengutip ilustrasi keseluruhan dari beberapa populasi. Pengumpulan ilustrasi yakni ilustrasi keseluruhan. Pendekatan riset yang dipakai dalam riset ini merupakan memakai pendekatan kualitatif. Pendekatan riset kualitatif merupakan pendekatan riset yang berdasarkan realisasi sosial, dipakai buat mempelajari pada situasi subjek alami,( selaku lawannya merupakan penelitian) dimana periset merupakan selaku instrumen kunci, metode pengumpulan informasi dicoba dengan cara kombinasi, analisa informasi bertabiat kualitatif, serta riset kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi. Tipe riset yang dipakai merupakan riset yang melukiskan serta menarangkan kasus yang diawasi dalam wujud perkataan serta bukan dalam angka- angka setelah itu dianalisa dengan memakai anggapan

serta amatan filosofi. Tipe riset ini merupakan riset deskriptif ialah kegiatan yang bermaksud buat mencari Cerminan ataupun hasil dari sesuatu insiden, suasana, sikap, poin ataupun kejadian pada warga yang didesain buat memperoleh sesuatu data dalam kondisi saat ini. riset deskriptif dilaksanakan buat meningkatkan tujuan yang besar dari ilmu wawasan yang melandasi permasalahan dalam uraian. Konsep riset ialah konsep global dari riset melingkupi keadaan yang hendak dicoba periset mulai dari membuat anggapan serta implikasinya dengan cara operasional hingga pada analisa akhir, informasi yang berikutnya disimpulkan serta diserahkan anjuran. Sesuatu konsep riset melaporkan, bagus bentuk permasalahan riset ataupun konsep pelacakan yang hendak digunakan buat mendapatkan fakta empiris hal hubungan- hubungan dalam permasalahan. Metode pengumpulan informasi yang hendak dipakai dalam riset ini Yang berada Jalan. jawa Jalan. cipanas Belawan 2, Belawan Ii, Kec. Area Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera. Riset ini hendak dicoba sehabis seminar ide berakhir selaku selanjutnya: a. Pemantauan; b. Tanya jawab; c. Dokumentasi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
**Kondisi Umum SMP Swasta Yaspemda**

SMP Swasta Yaspemda ialah salah satu SMP yang terdapat di Kota Medan, yang terdapat di Jalur. Jawa Jalan. cipanas Belawan II Kec. Medan Kota Belawan Kota Area Provinsi Sumatera Utara. Pembelajaran pada SMP swasta ini dicoba sepanjang 6 hari, ialah pada hari Senin sampai Sabtu. Sebaliknya kurikulum yang di maanfaatkan sedang kurikulum 2013. SMP Swasta Yaspemda mempunyai no NPSN 10211037. SMP SWASTA YASPEMDA BELAWAN Kota Medan berlandung pada Departemen Pembelajaran serta Kultur. Merujuk akta yang terdapat, ialah pesan ketetapan pendirian( 637 atau I. 05 atau KEP atau 1977), Sekolah ini sudah terdapat semenjak 1979- 01- 01. Sebaliknya buat ijin operasional sekolah ini sudah diperbaharui terakhir pada bertepatan pada 2019- 10- 25 serta mempunyai no pesan ijin operasional 420 atau 16166. SMP atau 2019 Bersumber pada pengakuan terakhir yang dicoba pada 2018, SMP SWASTA YASPEMDA BELAWAN Kota teritori mempunyai pengakuan C. Dengan rincian angka pengakuan antara lain; angka standar isi merupakan 7 puluh 5, angka standar cara merupakan 7 puluh 3, angka standar kelulusan merupakan 8 puluh satu, angka standar daya pengajar merupakan 6 puluh, angka standar alat infrastruktur merupakan 6 puluh 5, angka standar pengurusan merupakan 8 puluh 8, angka standar pembiayaan merupakan 9 puluh satu, angka standar evaluasi merupakan 7 puluh 3, Alhasil angka keseluruhan pengakuan SMP SWASTA YASPEMDA BELAWAN Kota Medan merupakan 75. Anak didik SMP Swasta Yaspemda kebanyakan agama Islam.

**Tenaga Pendidik SMP Swasta Yaspemda**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka diperoleh data tentang tenaga pendidik di SMP swasta Yaspemda sebagai berikut;

No	Nama	Tempat, Tanggal lahir	Jabatan	TMT	Jurusan
1.	Yusrawati S. Pd	Aceh Utara, 17 Juni 1966	Kasek	1999	B. Indonesia
2.	Hj. Chasiah, S.Pd	Medan, 1 Juni 19	Guru	1980	B. Indonesia
3.	Mampe, SH	Balige, 23 Februari 1965	Guru	1992	B. Inggris
4.	Anthoni, S.kom	T. Mulia Hilir, 2 Agustus 1984	Guru	2013	TIK
5.	Sitti Khadijah, S.Pd	Belawan, 27 Juli 1965	Guru	2012	Matematika
6.	Khadijah, S. Pd	Belawan, 7 Juni 1970	Guru	2015	Matematika
7.	Ramayana br. Marbun, S. Pd	Belawan, 23 Maret 1981	Guru	2016	PPKn
8.	Sudadi, S.Pd	Nibung, 7 Juli 1965	Guru	2017	B.Inggris
9.	Fitria Kartika, S. Pd	Belawan, 21 April 1990	Guru	2017	IPS
10.	Silvyva Kristian Silaen, S. Pd	Belawan, 10 Januari 1983	Guru	2018	IPA
11.	H.M. Nurwahbi, S. Pd.I	Medan, 13 Juni 1963	Waka	2019	SBK/Agama

---

12.	Hadi Muchbir, S. Pd	Belawan, 22 Januari 1998	Guru	2019	Penjas
13.	Hj. Masnah	P. Siantar 28 Desember 1958	Bendahara	1980	BK

### **Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan hasil observasi Tim yang telah dilakukan oleh peneliti maka, dapat di peroleh data sebagai berikut:

1. 1 ruangan kepala sekolah.
2. 1 ruangan guru. Yang didalamnya juga tergabung dengan ruang walil kepala sekolah.
3. 3 kamar mandi (1 untuk laki laki, 1 untuk wanita, 1 untuk guru dan kepala sekolah).
4. 5 ruangan kelas, yakni kelas 9, kelas 8a dan 8b dan kelas 7
5. 1 ruangan kosong yg tidak digunakan lagi.

### **Upaya guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Berlatih merupakan cara mengganti sikap selaku akibat yang didapat oleh panca alat yang relatif permanen. Dalam cara berlatih membimbing, itu guru menginginkan suasana serta situasi yang mensupport serta mendukung (Ngurah, 2013). Selaku usaha buat pergi dari penataran yang bertabiat memborgol itu mengarah pada penataran yang melepaskan diperlukan kelangsungan serta tindakan luas dada dari guru buat membagikan peluang seluas-luasnya pada partisipan ajar untuk mengekspresikan buah pikiran serta pikirannya ialah ilustrasi usaha menancapkan nilai- nilai demokrasi. Seseorang guru Ramayana Br. Marbun (42 Tahun) wajib PKN wajib sanggup membagikan ataupun mengarahkan pada anak didik ilustrasi bersikap cocok dengan nilai- nilai kerakyatan semacam perihalnya dalam penataran Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan. Dalam melakukan suatu dialog kedudukan seseorang guru amatlah diperlukan buat mengajak tiap anak didik membagikan asumsi serta merumuskan hasil dari dialog dengan konferensi. Guru Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan wajib sanggup membagikan antusias ataupun dorongan pada anak didik supaya lebih yakin diri dalam mengatakan pendapatnya ataupun mengekspresikan ciptaannya. Informan bernama Ramayana Br. Marbun (42 tahun) berlaku seperti guru Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan mengatakan kalau:" dalam menancapkan nilai-nilai kerakyatan butuh terdapatnya usaha guru dalam membagikan ilustrasi ataupun sikap silih menghormati, menuntaskan permasalahan dengan konferensi, menghormati opini sahabat dikala melaksanakan dialog, menghormati sahabat yang berlainan kaum sanggup mengatur diri serta tingkatan rasa yakin diri anak didik, dan mematuhi peraturan sekolah yang legal Lewat penataran Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan biar anak didik memiliki jiwa kerakyatan yang besar." Semacam: kala melaksanakan suatu dialog dalam penataran Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan seseorang guru wajib membagikan independensi pada anak didik buat membagikan asumsi atau persoalan terpaut modul yang dipelajari. Seseorang guru pula wajib sanggup membagikan antusias serta dorongan pada anak didik yang mempunyai tindakan kurang yakin diri alhasil bisa tingkatan rasa yakin diri anak didik dalam seluruh perihal. Guru pula wajib sanggup mengajak anak didik buat patuh peraturan yang terdapat di dekat paling utama di sekolah dengan mempraktikkan tindakan patuh santun serta adab. Bagi guru Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan" dalam menancapkan nilai- nilai kerakyatan pada anak didik terdapat banyak halangan ataupun hambatan yang dirasakan semacam: sulit menata anak didik ataupun mengajak anak didik dalam mengemukakan opini disebabkan kurang minatnya anak didik dalam penataran Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan ataupun ketidaktahuan anak didik pada modul yang lagi dipelajari. Buat membagikan rasa yakin diri anak didik ialah dengan tingkatan hasil berlatih anak didik alhasil anak didik mempunyai modal dalam beranggapan ataupun mengatakan benak tiap- tiap.

### **Sikap demokrasi siswa pada pembelajaran PKN kelas 8**

Tindakan anak didik amatlah berarti dalam cara berlatih membimbing. Siswi ramayanti mengatakan kalau“ kurang minatnya dalam penataran Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan alhasil mengakibatkan kurang atensi kala Guru lagi membimbing yang menimbulkan ketidaktahuan dalam mempraktikkan nilai- nilai kerakyatan”. Tindakan semacam seperti itu yang membuat kedudukan seseorang guru amatlah berarti supaya anak didik yang tidak menggemari pelajaran Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan jadi penggemar Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan serta seseorang guru wajib sanggup membagikan ilustrasi pada anak didik mengenai gimana penerapan nilai- nilai kerakyatan. Sheila Putri mengatakan kalau“ kurang minatnya berlatih Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan dan kurang mencermati Guru lagi membimbing serta kala seseorang guru membagikan peluang pada anak didik buat menanya ataupun berikan asumsi Anak didik sedang kurang yakin diri dalam mengatakan pendapatnya”. Dari di atas bisa disimpulkan kalau kedudukan seseorang guru dalam penataran Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan sedang amat kurang di mana Anak didik sedang kurang mempunyai atensi dalam penataran Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan alhasil membuat anak didik kurang mencermati kala Guru lagi membimbing yang menyebabkan nilai- nilai kerakyatan yang sudah diaplikasikan oleh guru dilaksanakan oleh anak didik. Sheila Putri mengatakan kalau“ aku serta sahabat aku silih menghormati meluhurkan tanpa memandang kaum suku bangsa atau adat tiap- tiap. Pula kita sudah mematuhi peraturan yang legal di sekolah”. Itu meyakinkan kalau beberapa nilai- nilai kerakyatan di SMP swasta yaspemda sudah dilaksanakan.

### **Hasil wawancara dengan guru PPKn Ramayana Br. Marbun, S.Pd**

1. Bagaimana peran ibu dalam menanamkan nilai nilai demokrasi kepada siswa? Membagikan independensi pada anak didik dalam mengemukakan opini, membagikan uraian pada anak didik hal perbandingan, membagikan uraian pada anak didik hal kerakyatan; serta anak didik pula diserahkan peluang pada anak didik buat berpartisipasi aktif dalam kategorisasi organisasi kelas, jadi eksekutor kerakyatan dalam aktivitas kategorisasi organisasi kelas.
2. Upaya apa saja yang ibu lakukan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PKN? butuh terdapatnya usaha guru dalam membagikan ilustrasi ataupun sikap silih menghormati, menuntaskan permasalahan dengan konferensi, menghormati opini sahabat dikala melaksanakan dialog, menghormati sahabat yang berlainan kaum, sanggup mengatur diri serta tingkatkan rasa yakin diri anak didik, dan mematuhi peraturan sekolah yang legal Lewat pembelajaran Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan biar anak didik memiliki jiwa kerakyatan yang besar.
3. Apa yang menjadi hambatan atau kendala ibu dalam menanamkan nilai- nilai demokrasi kepada siswa pada saat pembelajaran PKN berlangsung? Halangan ataupun hambatan yang dirasakan ialah sulit menata anak didik ataupun mengajak anak didik dalam mengemukakan opini disebabkan kurang minatnya anak didik dalam pembelajaran Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan ataupun ketidaktahuan anak didik pada modul yang lagi dipelajari.
4. Strategi apa yang ibu gunakan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi? Strategi yang dipakai dalam menancapkan nilai- nilai kerakyatan ialah, ekspositori, strategi penataran heuristic serta strategi penataran reflektif alhasil anak didik bisa menancapkan nilai- nilai kerakyatan buat aktivitas kesehariannya ialah di dalam kategori, di area keluarga, di area sekolah dan bisa diaplikasikan dalam area warga.

Strategi penataran ekspositori yang dimana cuma mengantarkan utama dari suatu modul penataran dalam penyampaian utama modul itu. Perihal itu bagi Anissatul Mufarokah( 2009), penataran ekspositori merupakan guru menyuguhkan dalam wujud yang sudah direncanakan

dengan cara apik, sistematis serta komplit, alhasil anak ajar bermukim menyimak serta mengolahnya saja dengan cara teratur serta tertib. Pemakaian strategi penataran heuristik dalam cara penataran dipakai ataupun diaplikasikan kala anak didik di dalam kategori kala mulai tidak mendukung alhasil guru membuat sebagian golongan dalam satu kategori itu serta esoknya dalam golongan itu diserahkan modul yang bermaksud supaya anak didik dialog serta menyampaikan didepan. Perihal itu cocok opini Bagi Sri Anitah( 2007: 150), penataran heuristik merupakan “ yang mencari serta memasak catatan( modul penataran) yakni anak didik. Guru berfungsi selaku pembimbing aktivitas berlatih anak didik.” Dengan dialog anak didik bisa lebih menguasai mengenai modul yang terdapat dalam penataran serta modul dapat tersampaikan pada anak didik alhasil anak didik bisa mempraktikkan ilmu yang diterima di dalam kategori, dalam area sekolah, area keluarga ataupun area warga dimana anak didik itu bermukim. Perihal itu cocok pendapat H. Dale. Schunk( 2012: 384- 38) yang mengemukakan kalau penataran reflektif ialah tata cara pembelajaran yang selaras dengan filosofi konstruktivisme yang memandang kalau wawasan tidak di atur dari luar diri seorang namun dari dalam dirinya.

**Objek Observasi**

Pelaksanaan proses pembelajaran PKn kelas VIII SMP Swasta Yaspemda Belawan.

**Tabel 2. Kisi-Kisi Lembar Observasi Guru**

No	Aktivitas Guru	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan
1.	Membuka pembelajaran	✓	
2.	Memberikan materi terkait nilai-nilai demokrasi	✓	
3.	Membimbing siswa dalam melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi	✓	
4.	Memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar aturan sekolah	✓	
5.	Memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengemukakan pendapat	✓	
6.	Memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa	✓	
7.	Memberikan semangat dan motivasi kepada siswa untuk lebih percaya diri	✓	
8.	Membentuk karakter siswa untuk bisa mengendalikan diri supaya tidak merugikan orang lain	✓	
9.	Membentuk kelompok belajar supaya siswa lebih aktif dan belajar bermusyawarah	✓	
10.	Membimbing siswa untuk menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada	✓	
11.	Menutup pembelajaran	✓	

Berdasarkan hasil observasi mengenai peran guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa melalui pembelajaran PKn di kelas VIII SMP Swasta Yaspemda Belawan, diperoleh data sebagai berikut:

1. Guru selalu memulai pelajaran dengan doa dan memberikan motivasi serta pujian untuk meningkatkan semangat siswa.
2. Guru menjelaskan materi tentang nilai-nilai demokrasi dan mengajak siswa untuk menerapkannya di lingkungan sekitar.
3. Guru membimbing siswa dalam melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah, rumah, maupun lingkungan luar.

4. Guru memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar aturan sekolah dengan tujuan agar siswa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Guru memberikan teguran kepada siswa yang tidak disiplin atau menyepelekan tugas yang diberikan untuk dikerjakan di rumah.
5. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, memberikan tanggapan, dan saran, sehingga siswa belajar untuk lebih percaya diri dan berdemokrasi.
6. Guru memperlakukan semua siswa dengan adil, tanpa membedakan agama, suku, atau lainnya.
7. Guru memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa untuk lebih percaya diri dalam bertindak dan tidak bergantung pada orang lain.
8. Guru membentuk kelompok belajar agar siswa lebih aktif dan belajar musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
9. Guru membimbing siswa untuk menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada.
10. Guru menutup pelajaran dengan doa dan memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa untuk minggu depan.

### **Hasil angket observasi dari setiap pertanyaan**

Penelitian ini merupakan studi kasus yang mengeksplorasi peran guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa melalui pembelajaran PKn di kelas VIII SMP Swasta Yaspemda Belawan. Data diperoleh melalui angket observasi. Dari hasil angket mengenai peran guru dalam penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PKn, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Penghargaan terhadap agama dan kepercayaan: Sebanyak 10 siswa sangat setuju, 10 siswa setuju, dan 4 siswa ragu-ragu, dengan persentase 86,6%. Data ini menunjukkan bahwa guru berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi.
2. Penghargaan terhadap perbedaan pendapat teman: Sebanyak 9 siswa sangat setuju, 9 siswa setuju, dan 6 siswa ragu-ragu, dengan persentase 78,3%. Ini menunjukkan peran signifikan guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi.
3. Pemahaman dan penghormatan terhadap keanekaragaman: Sebanyak 7 siswa sangat setuju, 12 siswa setuju, dan 5 siswa ragu-ragu, dengan persentase 81,6%. Data ini mengindikasikan peran penting guru dalam penanaman nilai demokrasi.
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi: Sebanyak 12 siswa sangat setuju, 9 siswa setuju, dan 3 siswa ragu-ragu, dengan persentase 87,5%. Ini menunjukkan peran kuat guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi.
5. Kemampuan mengendalikan diri: Sebanyak 8 siswa sangat setuju, 11 siswa setuju, dan 5 siswa ragu-ragu, dengan persentase 82,5%. Data ini mencerminkan peran efektif guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi.
6. Partisipasi dalam organisasi dan musyawarah: Sebanyak 14 siswa sangat setuju, 9 siswa setuju, dan 1 siswa ragu-ragu, dengan persentase 90,83%. Ini menunjukkan peran signifikan guru dalam mendorong partisipasi demokratis.
7. Kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat: Sebanyak 11 siswa sangat setuju, 10 siswa setuju, dan 3 siswa ragu-ragu, dengan persentase 85%. Data ini menunjukkan peran penting guru dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa.
8. Kepatuhan terhadap peraturan sekolah: Sebanyak 11 siswa sangat setuju, 8 siswa setuju, dan 6 siswa ragu-ragu, dengan persentase 82,5%. Ini mengindikasikan peran kuat guru dalam menanamkan disiplin dan nilai demokrasi.

Secara keseluruhan, hasil angket menunjukkan bahwa peran guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi di kelas VIII SMP Swasta Yaspemda Belawan sangat efektif, dengan persentase positif pada angket observasi sebesar 674,83%.

## **KESIMPULAN**

Bersumber pada hasil tanya jawab riset mengenai guru dalam menancapkan nilai-nilai kerakyatan Lewat penataran Pembelajaran Pancasila kebangsaan hingga didapat kesimpulan selaku selanjutnya: kedudukan guru ialah membagikan ilustrasi ataupun mengarahkan anak didik sikap silih menghormati membahas suatu modul lewat konferensi perundingan, tingkatkan rasa yakin diri anak didik, mengajarkan ke siswa buat silih meluhurkan yang berlainan kaum suku bangsa adat dan mematuhi peraturan yang legal di sekolah.

Saran: Bersumber pada kesimpulan yang dikemukakan di atas, hingga anjuran yang bisa periset kemukakan sehubungan dengan hasil riset ini merupakan: Tingkatkan atensi anak didik kepada penataran Pembelajaran Pancasila serta Kebangsaan dan menguasai karakter dari anak didik tersebut. Memakai tata cara belajar yang gampang yang bisa dimengerti anak didik biar pada dikala pengajaran nilai-nilai kerakyatan anak didik bisa lebih menguasai. Pada anak didik supaya lebih menguasai serta mematuhi pengajaran yang terdapat di sekolah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aan Hasanah. 2012. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abu ahmadi , Joko Tri Prasetya. 2005. *Strategi belajar mengajar*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ahmad Fauzi. 2013. *Manajemen Pembelajaran*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Affandi, I, 2005, *Pendidikan Demokrasi Dalam Konteks Pembangunan Masyarakat Madani*, Bandung: National Seminar civid Education.
- Ahmadi Abu. 2005. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Andi Hakim
- Atmadi, A dan setyaningsih, Y. 2004, *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga* Yogyakarta: Kanisius dan Universitas Sanata Dharma
- Beni Ahmad Saebani, Khdiyot Hendra. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Betham, David. 2000. *Demokrasi*. Kansius: Yogyakarta.
- Bungin Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kaelan & Zubaidi, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: paradigma.
- Karim, Abdul Gaffar, 2013, *Anak Muda Cerdas Berdemokrasi*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Nasution. 1985. *Daun-daun Berserakan; Percikan Pemikiran Mengenai Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan*. Jakarta: Intisarana Aksara.
- Winarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara.